



Paslon Wajib Tes Rambut

Untuk Mengetahui Kandungan Zat Narkoba Tiga Bulan ke Belakang

YOGYAKARTA – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Yogyakarta memutuskan melakukan tes rambut terhadap dua pasangan bakal calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi dan Imam Priyono-Ahmad Fadli.

BNN takingin kecolongan mengujik kedua paslon agar hasil rangkaian tes kesehatan akurat sebagai parameter penetapan paslon pada Pilwali Kota Yogyakarta 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Ada surat edaran dari BNN Pusat semalam. Perintahnya agar melakukan tes rambut dan urine semua calon kepala daerah," kata

Kepala BNNK Yogyakarta Saptohadi, kemarin.

Sebelumnya, pemeriksaan kedua paslon dalam tes bebas narkoba hanya memakai metode tes urine. Tidak dengan tes rambut dan darah sesuai dengan standar pemeriksaan BNN karena alasan keterbatasan waktu mengingat peralatan melakukan kedua tes

itu hanya dimiliki BNN Pusat.

Saptohadi mengakui tes bebas narkoba untuk calon kepala daerah baru pertama kali dilakukan. Namun, dia enggan menjelaskan lebih jauh soal tes melalui rambut tersebut karena kewenangan ada di tim pemeriksaan kesehatan pasangan calon. Pada siang kemarin, BNNK Yogyakarta langsung membawa sampel rambut pasangan calon ke BNN Pusat untuk diuji. Tiap calon diambil 50 helai rambutnya. Tes bebas narkoba melalui rambut hasilnya memang lebih akurat karena bisa mengetahui kandungan zat narkoba tiga bulan ke belakang.

(Ke Hal 7)



Petugas BNNK Yogyakarta memotong rambut bakal calon Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi (kanan) saat melakukan pemeriksaan tes bebas narkoba di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Yogyakarta, kemarin.

Paslon Wajib Tes Rambut

((dari Hal 1

Sementara tes urine hanya bisa mengetahui apakah ada kandungan zat narkoba dalam tubuh paslon selama sepekan ke belakang.

Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budiantono mengatakan, pihaknya menerima rekomendasi dari BNN bahwa tes bebas narkoba terhadap paslon ditambah dengan metode pemeriksaan rambut. "Hari ini (kemarin) sudah diambil sampel rambut dan langsung dikirim ke BNN," ujarnya saat jumpa pers di Kantor KPU DIY.

Diakui, mengetahui hasil dengan metode tes rambut memang membutuhkan waktu lebih lama daripada tes urine. Namun, dia yakin proses tersebut tidak sampai mengganggu tahapan pilwali yang sudah dijadwalkan KPU. "Ini untuk memperkuat pemeriksaan," katanya.

Kemarin juga berlangsung rangkaian tes kesehatan terakhir bagi kedua paslon, yaitu tes psikologi bertempat di Rumah Sakit Jogja. Kedua paslon, Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi dan Imam Priyono-Ahmad Fadli, tampak serius mengerjakan soal yang diberikan tim kesehatan.

Wawan mengatakan, tes psikologi ini dilakukan mengetahui aspek kejiwaan bakal calon. Ditegaskannya, rangkaian tes kesehatan yang wajib dijalani paslon selama dua hari, Senin (26/9)-Selasa (27/9), meliputi tes jasmani, rohani, dan bebas narkoba bukan formalitas semata. Namun, sebagai salah satu parameter bisa mempengaruhi persyaratan pendaftaran paslon. "Jika ada bagian yang tidak lolos tentu persyaratan pencalonan menjadi tidak terpenuhi," katanya.

Komisiner KPU DIY Guno Tri Tjahjoko mengapresiasi langkah BNN melakukan tes rambut. Apalagi belakangan ini ada sejumlah kepala daerah terindikasi menggunakan

obat-obat terlarang sehingga perang melawan narkoba harus diwujudkan dari berbagai lini.

"Satu-satunya yang memiliki laboratorium menguji sampel rambut memang BNN di Jakarta. Akan menambah waktu, tapi tidak mengubah tahapan pilkada serentak," katanya. Diakui, metode tes rambut akan menjamin akurasi syarat bebas narkoba.

Saling Klaim Prestasi

Meski sempat mesra memimpin Kota Yogyakarta periode 2011-2016, tapi kali ini Haryadi Suyuti dan Imam Priyono harus pisah ranjang alias saling sikut guna meraup dukungan masyarakat. Bahkan belum ada penetapan pasangan calon oleh KPU pun, mereka sudah saling klaim prestasi kinerja lima tahun terakhir ini.

Imam Priyono (IP) dalam Pilwali 2017 menggandeng Ahmad Fadli, figur nonparpol sebagai wakilnya. Pasangan bakal calon yang diusung koalisi PDIP-NasDem dan didukung PKB itu mengumbar janji siap membawa perubahan bagi Kota Yogyakarta sesuai tema yang mereka usung, *Jogjakarta Hebat*.

"Mengubah Yogya sebagai kota budaya saat ini menurut berbagai pihak, Yogya telah dijual kebijakannya. Kami akan tata ulang," kata IP.

Program IP-Fadli ada lima poin, yaitu menata ulang rencana detail tata ruang kota, menata lingkungan terutama pengelolaan limbah, menjamin masyarakat miskin bisa mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi, menjamin layanan kesehatan bagi masyarakat, dan mengoptimalkan peran kelurahan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.

"Kami juga akan kembalikan *sego segawe* seperti zaman Pak Harry Yudianto (mantan wali kota Yogyakarta), tiap Jumat di pemkot dan sekolah

wajib bersepeda," kata mantan Dirut PDAM Kota Yogyakarta itu.

IP juga mengomentari keluhan masyarakat soal pesatnya pembangunan hotel dan keberadaan toko modern di Kota Yogyakarta. Dia akan menyiapkan rencana agar pasar modern nanti bisa disinergikan dengan pasar tradisional sehingga tidak terjadi persaingan usaha. "Hotel juga sudah terlalu banyak, harus dievaluasi. Tapi yang sudah terlanjur berdiri jangan sampai pengusahan rugi, kita harus duduk bersama demi kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Bahkan IP mengklaim partainya, PDIP, telah menepati janji politiknya saat Pilwali 2011, yaitu membangun rumah sakit tanpa kelas, RS Pratama. "Membangun RS Pratama itu hasil perjuangan PDIP. Program Imam Priyono saat menjabat wakil wali kota," katanya.

Sementara Haryadi Suyuti menggandeng Ketua DPD PAN Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi sebagai wakilnya. Tak ingin kalah dengan pesaingnya, pasangan bakal calon yang diusung koalisi Golkar, PAN, PKS, Demokrat, Gerindra, dan didukung PPP ini mengumbar janji politik.

Kerap mendapat sorotan publik semasa menjabat Wali Kota Yogyakarta, Haryadi berjanji jika terpilih dalam Pilwali 2017 akan mengubah Yogyakarta lebih maju sesuai tema yang mereka usung, *Jogja Berkemajuan*. "Yogya yang berkeadilan dalam segala hal, aspek kehidupan, dan keumatan yang religius, aman, tertib," kata kader Partai Golkar itu.

Haryadi berjanji akan memperbaiki segala aspek yang selama ini menjadi sorotan publik dan mengadakan kebijakan yang belum diambil selama kepemimpinannya lima tahun belakang. "Yang ada diperbaiki, yang belum diadakan," katanya. Haryadi mengklaim, sela-

ma lima tahun pemerintahannya banyak prestasi yang diraih. Setidaknya ada 80 penghargaan diberikan berbagai lembaga pemerintah pusat dan lembaga swadaya masyarakat atas kinerja Pemkot Yogyakarta.

"Dengan pengalaman pemerintahan yang lalu, kini kami membangun tim yang lebih solid, jauh lebih kompak, jauh lebih bisa bekerja sama sehingga bisa saling mendukung," katanya.

Kendati terbalut suasana kompetisi, tapi Haryadi menganggap IP sebagai teman bukan lawan. "Hubungan dengan Pak Imam baik, yang menang nanti adalah hati masyarakat," ujarnya.

KPU Kulonprogo Tunggu Pendaftaran Pilkada

Sementara keputusan KPU Kulonprogo memperpanjang masa pendaftaran pasangan bakal calon bupati-wakil bupati mulai dari 28-30 September 2016 diharapkan bisa dimanfaatkan partai politik yang belum mendaftarkan calonnya.

Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan mengatakan, perpanjangan pendaftaran paslon Pilkada Kulonprogo mulai dari 28-30 September 2016. Hari pertama dan kedua dibuka sampai pukul 16.00 WIB. Sedangkan hari ketiga sampai dengan pukul 24.00 WIB. Namun, jika ternyata habis batas waktu tidak ada paslon yang mendaftar, maka KPU tetap akan melaksanakan tahapan pilkada dengan satu paslon alias melawan kotak kosong.

"Kasus serupa terjadi pada pilkada serentak sebelumnya di Tasikmalaya dan Blitar. Sesuai Peraturan KPU No 14/2015 memang bisa dilaksanakan pilkada dengan satu paslon," ujarnya.

Ketua KPU Kulonprogo, Isnaini mengatakan, baru ada satu paslon yang mendaftar, yaitu petahana Hasto Wardoyo-Sutedjo yang diusung enam

parpol, seperti PDIP, PAN, Golkar, PKS, Hanura, dan NasDem dengan total 27 kursi di DPRD Kulonprogo.

Masih ada peraih kursi di dewan yang belum mendaftarkan calonnya, yaitu PKB, Gerindra, dan Demokrat. "Kami masih menunggu. Jika tidak ada yang mendaftar, kami tetap laksanakan tahapan pilkada dengan calon tunggal," ujarnya.

Diketahui, koalisi PKB, Gerindra, dan Demokrat dikabarkan akan mendaftarkan paslonnya, Zuhadmono Ashari-BRAYirani Pramastuti ke KPU Kulonprogo. Namun hingga hari terakhir pendaftaran, Jumat (23/9) pukul 24.00 WIB, urung mendaftar karena diduga masih ada tarik ulur di internal partai pengusungnya.

Zuhadmono-Irani Diterpa Isu Mundur

Pasangan Zuhadmono Ashari-BRAYirani Pramastuti diterpa isu kurang sedap. Di masyarakat beredar isu pasangan ini tidak akan melanjutkan proses pencalonan. Namun, isu ini langsung ditepis pengurus PKB dan Partai Gerindra.

Tim Bapil DPC Partai Gerindra Kulonprogo Adi Sutrisno mengakui banyak *black campaign* terhadap pasangan yang akan diusung Koalisi Gotongroyong ini. Mulai dari keraguan pasangan maju, calon yang memilih mundur, hingga koalisi tidak solid. "Saya tegaskan koalisi ini tetap solid, dan tetap akan mengusung Zuhadmono-Iranni," kata Adi Sutrisno.

Sesuai rencana pasangan ini akan mendaftar di KPUD Kulonprogo, Kamis (28/9) sekitar pukul 13.00 WIB. Rencana mereka akan berangkat dari rumah mantan Bupati Kulonprogo Toyo Santoso Dipo di timur perempatan Nagung. Toyo merupakan kader dan dua kali menjadi Bupati Kulonprogo melalui PDIP.

● ristuhanafi/kuntadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005